

PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**

JL. Proklamasi No. 2 Purworejo 54111 Telp/Fax (0275) 325202

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB VI	PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Penyesuaian indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Rekomposisi pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru, penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan, yaitu

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan sehingga dapat diketahui capaian kinerja yang masih perlu mendapat perhatian.
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renja merupakan penyempurnaan usulan dari perangkat daerah dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah
3. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah penetapan RKPDP sehingga penyusunannya harus mengacu pada RKPDP yang telah ditetapkan.
4. Penetapan Perubahan Renja yang merupakan tahapan akhir penyusunan renja perangkat daerah dan harus dilaksanakan maksimal dalam 1 bulan setelah penetapan RKPDP.

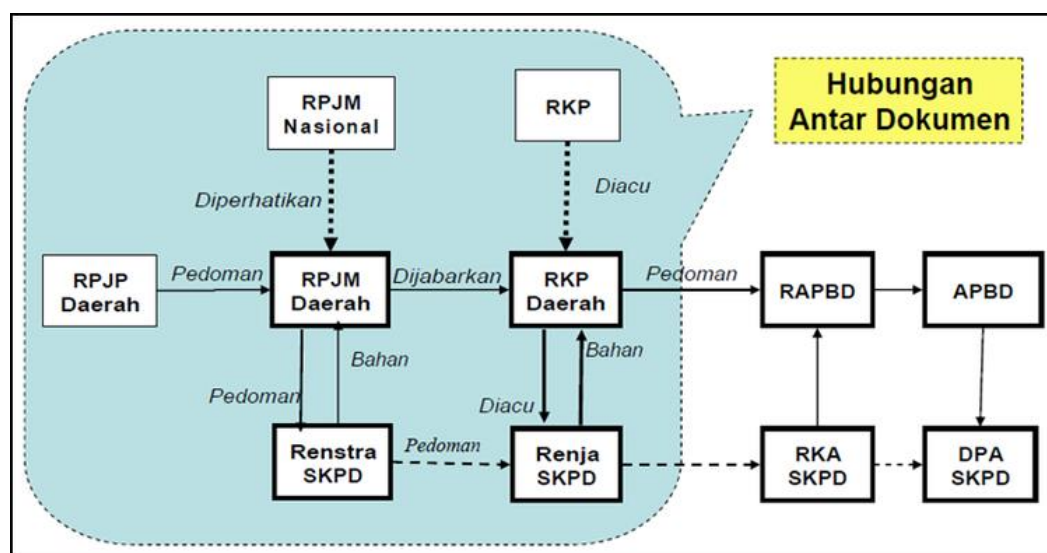
Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2022 baik terhadap target capaian kinerja maupun anggaran.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo mempunyai keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renja ini merupakan tahun ke-15 dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Purworejo merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo serta penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.
3. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Purworejo untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purworejo. RKPD Kabupaten Purworejo menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD Kabupaten Purworejo menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purworejo.

- Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RKPD Kabupaten Purworejo

Dokumen Perubahan Renja yang telah disahkan akan menjadi dasar dalam pembahasan untuk menentukan besarnya RAPBDP (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) yang akan diurai lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah :

- Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8);
20. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
21. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44).

22. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 (seri E Nomor 34).
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
24. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 9 Seri A Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 20 Seri A Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 71 Seri A Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan terkait dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

2. Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran dalam kurun waktu tengah semester 2, tahun 2022.
2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung visi dan misi Bupati .
3. menyediakan acuan resmi bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perubahan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang perubahan nomenklatur, indikator, dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan, Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022,

dan penjelasan mengenai sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Evaluasi Renja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD dalam kurun waktu II Triwulan terakhir.

Pada Tahun 2021, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 3.448.285.674 dari pagu RKPD sebesar 3.589.067.148 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan adalah sebesar 3.255.360.478 dari pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 8.100.807.714 dengan persentase capaian kinerja keuangan 40,18%. Capaian kinerja sebesar angka tersebut diatas masih kurang memuaskan / maksimal, dikarenakan masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penyesuaian pagu dan program kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK yaitu pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi mundur dari waktu yang sudah direncanakan.
2. Adanya pergeseran rincian belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan yaitu perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Tahun 2022 Sampai Triwulan II

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (padat tahun terakhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK, T, P, lain nya)		
					(5)		(6)		(7)				(8)				(9)		(10)							
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp			K	Satuan
XX 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88																					
XX 01 2.01				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88																					
XX 01 2.01 1				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	125.73.443.898	100 %	25.14.04.02.92	100 %	0.820.15.07.84	100	2.207.74.94.83	100	05.94.07.998	100 %	2.927.217.481	100	%	0,43	100 %	23,281	DPMP TSP	APBD			
XX 01 2.01 1				Pereencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41 dokumen	120375.725	41 dokumen	19.710.900	41 dokumen	19.750.000	8	4.277.000	11	0.847.000	19 dokumen	11.124.000	40,34	dokumen	0,50	40	dokumen	9,2202				
XX 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	32051775	10 dokumen	14.492000	10 dokumen	5.250.000	4	3.711.400	4	133.000	8 dokumen	3.844.400	50	dokumen	0,73	50	dokumen	11,994				
XX 01 2.01 02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.157.050	1 dokumen	0	1 dokumen	1.500.000	0	0	1	1.078.300	1 dokumen	1.078.300	100	dokumen	0,72	100	dokumen	11,775				
XX 01 2.01 03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.157.050	1 dokumen	0	1 dokumen	1.500.000	0	0	1	1.078.300	1 dokumen	1.078.300	100	dokumen	0,72	100	dokumen	11,775				
XX 01 2.01 04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	12.210.200	1 dokumen	0	1 dokumen	2.000.000	0	0	1	1.730.000	1 dokumen	1.730.000	100	dokumen	0,87	100	dokumen	14,173				
XX 01 2.01 05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	12.210.200	1 dokumen	0	1 dokumen	2.000.000	0	0	0	-	0 dokumen	-	0	dokumen	0,00	0	dokumen	0				
XX 01 2.01 06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	15.202750	10 laporan	0	10 laporan	2.500.000	4	0	4	1.989.800	8 laporan	1.989.800	50	laporan	0,78	50	laporan	12,84				
XX 01 2.01 07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	30.525.500	3 dokumen	3.224.900	3 dokumen	3.000.000	0	3.05.000	0	807.000	0 dokumen	1.433.200	0	dokumen	0,29	0	dokumen	4,081				
XX 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.594.417.735	100 %	2.190.413.334	100 %	2.723.05.2.010	100	3.993.49.021	100	3.00.904.318	100 %	900.314.139	100	%	0,35	100 %	9,0643					
XX 01 2.02				Pelayanan Ggudan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.455.392.397	12 Bulan	2.188.930.234	12 Bulan	2.700.157.148	3	3.96371.826	3	555.169455	0 Bulan	981541.281	50	Bulan	0,35	50	Bulan	9,101				

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	laporan	12.210.200	0	laporan	2.000.000	0	138.000	0	222.000				0	laporan	3.600.000	0	laporan	0,18	0	laporan	2.9484		
XX 01 20207			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24	laporan	114.604.927	24	laporan	6.483.100	24	laporan	18.899.408	0	2.839.790	2	4.173.003		2	laporan	8.412.808	8,33	laporan	0,41	8,3	laporan	7.3407	
XX 01 2.07 10			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	177.047.900	100	%	28.249.100	100	%	29.000.000	0	0	0	0	0	0	%	-	0	%	0,00	0	%	0	
XX 01 203 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19	Orang	177.047.900	19	Orang	28.249.100	19	Orang	29.000.000	0	0	0	0	0	0	Orang	-	0	Orang	0,00	0	Orang	0	
XX 01 1.00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	206.920.642	100	%	141.934.007	100	%	142.000.400	100	263.299.000	100	3.627.743	0	100	%	62.967.330	100	%	0,44	100	%	7,2033	
XX 01 100 09			Layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	206.920.642	12	Bulan	141.934.007	12	Bulan	142.000.400	3	263.299.000	3	3.627.743	0	0	Bulan	62.967.330	0	Bulan	0,44	0	Bulan	7,2033	
XX 01 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibebankan	0	jenis	-	0	jenis	-	0	jenis	3.772.801.200	2	1.816.520.490	2	20.126.400		4	jenis	1.841.771.890	80	jenis	0,49	80	jenis	0DIV/01	
XX 01 207 10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	unit	0	100	unit	0	100	unit	3.772.801.200	48	1.816.520.490	20	20.126.400		68	unit	1.841.771.890	68	unit	0,49	68	unit	0DIV/01	
XX 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	44.087.6744	12	Bulan	33.220.330	12	Bulan	7.233.7968	3	14.912.682	3	15.564.329		0	Bulan	30.477.071	0	Bulan	0,42	0	Bulan	6,9128	
XX 01 208 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	143.370.221	12	Bulan	24.240.000	12	Bulan	23.484.000	3	1.301.000	3	6.294.900		0	Bulan	7.496.400	0	Bulan	0,32	0	Bulan	4,2983	
XX 01 208 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	180.200.000	12	Bulan	20.400.000	12	Bulan	30.000.000	3	6.314.087	3	4.999.226		0	Bulan	11.274.813	0	Bulan	0,37	0	Bulan	6,003	
XX 01 208 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	111.290.973	12	Bulan	4.231.000	12	Bulan	18.303.468	3	7.290.090	3	4.310.263		0	Bulan	11.665.808	0	Bulan	0,63	0	Bulan	10,428	
XX 01 1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2	jenis	373.599.032	2	jenis	74.846.990	2	jenis	61.194.000	2	6.234.790		14.327.661		2	jenis	20.362.401	100	jenis	0,34	100	jenis	3,3039	

XX 01 2091			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajak dan	8	unit	218490772	8	unit	49446926	8	unit	35786600	1	389790	3	10414661				4	unit	16334451	30	unit	0,46	30	unit	7,4885																			
XX 01 20911			Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direrhabilitasi	90	unit	135118381	90	unit	25400069	90	unit	23408000	1	290000	3	3913000				4	unit	4208000	4,44	unit	0,17	4,4	unit	2,7128																			
	Peningkatan Nilai Investasi			Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10	%																																										
2.18		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	67,7	M																																										
2.18.2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	5	%	807.000.000	5	%	0	5	%	190.000.000	0	9.446.500		3.2588.200				0	%	4.2034.700	0	%	0,22	0	%	5,2088	DPMP TSP	APBD																	
2.18.2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Dok	807.000.000	1	Dok	0	1	Dok	190.000.000	0	9.446.500		3.2588.200			0	Dok	42034.700	100	Dok	0,22	1	Dok	5,2088																				
2.18.2.01.01			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Regulasi mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dok	807.000.000	1	Dok	0	1	Dok	190.000.000	0	9.446.500		3.2588.200			0	Dok	42034.700	100	Dok	0,22	1	Dok	5,2088																				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																																
Predikat kinerja Program																																																
2.18.03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,5	%	754.000.000	99,5	%	8.644.050	99,5	%	183.583.150	100	8.666.647		7.105.296				100	%	15.771.943	101	%	0,09	101	%	2,0918	DPMP TSP	APBD																	
2.18.03.01			Penyediaan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,5	%	754.000.000	99,5	%	138.644.050	99,5	%	183.583.150	100	8.666.647		7.105.296				100	%	15.771.943	101	%	0,09	101	%	2,0918																			
2.18.03.01.01			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1	Dok	366.900.000	1	Dok	138.644.050	1	Dok	59.889.700	0	1.778.500	4	1.640.000				4	Dok	3.418.500	400	Dok	0,06	400	Dok	0,9317																			
2.18.03.01.02			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten	4	Event	387.100.000	4	Event	0	4	Event	123.693.450	0	6.888.147	4	5.465.296				4	Event	12353.443	100	Event	0,10	100	Event	3,1913																			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																																
Predikat kinerja Program																																																
2.18.04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100	%	1.572.000.000	100	%	349.160.284	100	%	381.831.208	100	51.276.644	100	81.734.447					100	%	133.011.091	100	%	0,35	100	%	8,4613	DPMP TSP	APBD																
2.18.04.01			Pelayanan Peran dan Non Peran secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Peran dan Non Peran Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100	%	1.572.000.000	100	%	349.160.284	100	%	381.831.208	100	51.276.644	100	81.734.447					100	%	133.011.091	100	%	0,35	100	%	8,4613																		

2.18.04.2.01.01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Perizinan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan	12	Bulan	498.000.000	12	Bulan	220.237.704	12	Bulan	218.116.800	3	38.816.476	3	3.1747.391					0	Bulan	90.563.867	30	Bulan	0,42	30	Bulan	18.186																			
				Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat	4	Kali		4	Kali		4	Kali		3	0							3	Kali	73	Kali	73	Kali																						
				Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	0							1	Paket	100	Paket	100	Paket																						
2.18.04.2.01.02			Pemantuan Penemuan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Hasil Monitoring Penemuan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM	1	Dok	338.000.000	1	Dok	120.358.580	1	Dok	120.490.808	1	12.460.168	0	28.987.036					1	Dok	41.447.224	100	Dok	1,70	100	Dok																				
2.18.04.2.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1	Dok	338.000.000	1	Dok	8.264.000	1	Dok	12.913.000	0	0	0	1.000.000					0	Dok	1.000.000	0	Dok	#REF!	0	Dok																				
3.18.04.2.01.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi	1	Dok	338.000.000	1	Dok	0	1	Dok	24.310.000	0	0	0	-					0	Dok	-	0	Dok	#REF!	0	Dok																				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																																	
Prediktor kinerja Program																																																	
2.18.03			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100	%	1.663.000.000	100	%	3.22.770.800	100	%	3.99.212.402	100	2.942.321		60.009.712					100	%	62.932.039	100	%	0,16	100	%	3,7233	DPMP TSP	APBD																	
2.18.03.2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100	%	1.663.000.000	100	%	388.770.800	100	%	399.818.468	100	2.942.321		60.009.718					100	%	62.932.039	100	%	0,16	100	%	3,79																			
2.18.03.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Pemantuan Penanaman Modal	12	Bulan	554.333.333	12	Bulan	388.770.800	12	Bulan	0	0	0	0	0					Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0,00																						
2.18.03.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	12	Bulan	554.333.333	12	Bulan	0	12	Bulan	323.374.776	3	2.942.321	3	60.009.718					0	Bulan	62.932.039	30	Bulan	0,19	30	Bulan	11,36																			
2.18.03.2.01.03			Koordinasi dan	Pelaksanaan	12	Bulan	554.333.333	12	Bulan	0	12	Bulan	70.443.092	3	0	3	-					0	Bulan	-	30	Bulan	0,00		Bulan	0																			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																																	
Prediktor kinerja Program																																																	
2.18.04			PROGRAM PENGENDALIAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Layanan Perizinan Terintegrasi	100	%	307.800.000	100	%	22.122.000	100	%	120.432.104	100	214.353.23	100	26.633.082					100	%	42.110.467	100	%	0,40	100	%	9,4743	DPMP TSP	APBD																	
2.18.04.2.01			Pengendalian Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1	Dok	507.800.000	1	Dok	22.122.000	1	Dok	120.432.104	0	21.435.385	0	26.633.082					0	Dok	42.110.467	0	Dok	0,40	0	Dok	9,4743																			

2.18.06.2.01.01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1	Dok	507.800.000	1	Dok	88.122.000	1	Dok	120.438.104	0	21.455.385	0	26.655.082				0	Dok	48.110.467		Dok	0,40	0	Dok	9,4743															
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																												
Predikat kinerja Program																																												

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 (empat puluh empat) Perizinan yang dilayani yaitu :

NO	NAMA IZIN
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
4	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
5	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
6	IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI
7	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
8	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
9	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
11	IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
12	IZIN JAGAL HEWAN
13	IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
14	IZIN LINGKUNGAN
15	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
16	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
17	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)

18	IZIN REKLAME
19	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
20	IZIN OPERASIONAL PANTI
21	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
22	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
23	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
23	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
24	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
25	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
26	IZIN OPERASIONAL KLINIK
27	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
28	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
29	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
30	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
31	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
32	SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)
33	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
34	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
35	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
36	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
37	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
38	ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
39	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)

40	IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
41	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK)
42	IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS)
43	IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
44	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAH TRADISIONAL)

Dalam melaksanakan pelayanan, DPMPTSP telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan Perizinan (SPP), dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh stakeholder sehingga secara penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi transparan dan akuntabel.

Tabel 2.2

Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022
sampai dengan Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Realisasi capaian kinerja kurang dari 90% dari target dikarenakan adanya pergeseran rincian belanja untuk belanja modal sarana dan prasarana MPP
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Diperlukan tambahan anggaran untuk pembuatan Baliho, leaflet dan spanduk untuk promosi investasi
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Diperlukan tambahan anggaran untuk penyusunan Perbup Pendelegasian Kewenangan, pelaksanaan kegiatan gebyar pelayanan perizinan dan Launching MPP
4	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Makan Minum dan Pengembangan Aplikasi SI IDA

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan perlunya perubahan rencana kerja, antara lain:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Realisasi capaian kinerja kurang dari 90% dari target dikarenakan adanya pergeseran rincian belanja untuk belanja modal sarana dan prasarana MPP.
2. Diperlukannya tambahan anggaran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga perlunya rekomposisi pagu program kegiatan

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
- b) Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;
- c) Adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- d) Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP);
- e) Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SI IDA);
- f) Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KELEMAHAN (W):

- a) Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
- b) Kompetensi Aparatur Sipil Negara menurun karena berkurangnya pelaksanaan diklat yang diselenggarakan baik oleh instansi daerah maupun instansi vertikal untuk menambah keahlian dan keterampilan ASN;
- c) Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.

2. Lingkungan Eksternal**PELUANG (O):**

- a) Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
- b) Banyaknya pengusaha yang akan menanamkan modal
- c) Teknologi informasi berkembang pesat;
- d) Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
- e) Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAN (T):

- a) Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
- b) Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
- c) Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;
- d) Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus langsung perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
- e) Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Peningkatan pelayanan perizinan dapat diukur dari capaian kinerja layanan berdasarkan peningkatan jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) yang meningkat.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat berbagai perubahan ,pergeseran dan rekomposisi anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Penyesuaian perubahan nomenklatur, indikator, dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyesuaian perubahan nomenklatur, indikator, dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijelaskan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan, dan Hasil Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/ b/ c
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2	18	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	a

2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Dokumen	7 Dokumen	a
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	a
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	a
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	a

2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	a
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	a
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	a

2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	a
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	19 Orang/bulan	a
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	a

2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	a
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 Dokumen	a
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	a
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang / Kali	20 Orang	a

2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1 Laporan	a
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	1 Jenis	a
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	905 Unit	905 Unit	a
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 Bulan	3 Laporan	a

								Pemerintahan Daerah			
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1 Laporan	a
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	1 Laporan	a
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1 Laporan	a
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2 Jenis	a

2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	a
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	80 Unit	a
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	5 %	5 %	a
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Naskah Akademik Tentang Pemberian Insentif di Bidang Penanaman Modal	Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	a

2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Regulasi mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	a
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5 %	99,5 %	a
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	99,5 %	99,5 %	a
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	a

2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Event	1 Dokumen	a
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Dan Standar Prosedur Dan Kriteria	100 %	100 %	a
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Mendukung Penanaman Modal	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	100 %	a
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	12 Bulan	2500 Pelaku Usaha	a

								Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
								Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan	1 paket		a
								Penyuluhan Perizinan Pada Masyarakat	4 Kali		a
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Hasil Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Dokumen	20 Kegiatan Usaha	a

2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	20 Orang	a
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen	30 Kegiatan Usaha	a
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk	100 %	100 %	a

2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan pada Perusahaan	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan Berusaha	100 %	100 %	a
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Bulan	8 Pelaku Usaha	a
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 bulan	249 Kegiatan Usaha	a
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi	Persentase Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Disediakan	100 %	100 %	a

2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	a
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 bulan	4 Dokumen	a
							Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		12 bulan		

Pergeseran anggaran dilakukan karena adanya perubahan volume kegiatan serta dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rekomposisi pagu anggaran dilakukan karena adanya beberapa kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran, antara lain untuk :

1. Pelaksanaan Grand Launching Mal Pelayanan Publik;
2. Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Pelayanan Perizinan;
3. Pembuatan media informasi untuk promosi investasi (Baliho, spanduk, leaflet);
4. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah.

Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 5% yang difokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan iklim penanaman modal.

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ijin usaha dan/atau izin komersial/ izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan promosi.

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) sebesar 100% yang difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP, penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik
2. Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.
3. Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Usaha yang memenuhi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) sebesar 100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pengawasan penanaman modal.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Disediakan sebesar 100%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan aplikasi perizinan.

Dalam pelaksanaan perubahan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo, DPMPTSP akan melaksanakan 6 Program, 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan lokasi pelaksanaan di Kabupaten Purworejo dan Di Luar Kabupaten Purworejo. Kebutuhan dana/pagu indikatif Dpmptsp adalah sebagai berikut:

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PD PELAKSANA
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	228.320.000	APBD	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	203.144.150	APBD	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	498.437.208	APBD	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	399.818.468	APBD & DAK	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.294.104	APBD	DPMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.201.703.180	APBD	DPMPTSP
	TOTAL		7.681.717.110		

Rencana program dan pagu perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan pada tabel 3.2

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2022

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo dalam melaksanakan Program Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Tabel 3.3 SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN, DAN SASARAN SUB KEGIATAN

N O	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terbitnya Nomor Induk Berusaha
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Standar Prosedur Dan Kriteria
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan dan digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini telah disusun seoptimal mungkin dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 antara lain:

1. Perubahan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini dilandasi dengan hasil evaluasi kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II.
2. Penyesuaian indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan menyesuaikan adanya perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Renja DPMPTSP ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 pada akhir tahun 2022;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Purworejo, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Dengan disusunnya Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2022.

Purworejo, 1 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



AGUNG WIBOWO, AP.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740308-199311 1 002